



PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



RENJA AKHIR TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat, rahmat-Nya sehingga kami dapat membuat dan dan menyampaikan Rencana Kerja Akhir (Renja) Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagaimana mestinya.

Penyusunan Rencana Awal Renja ini merupakan pedoman terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabanan yang telah ditentukan. Adapun penyusunan Rencana Kerja Awal Tahun 2025 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk satu tahun anggaran yang memuat kebijakan program dan kegiatan.

Dalam penyusunan Rencana Awal Renja Tahun 2025 ini masih banyak kekurangan maupun kelemahan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Tabanan, 4 agustus 2025
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,



Dra. Ni Wayan Mariati,MM
NIP. 19680926 199403 2 008
Pembina Utama Muda (IVc)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja OPD disusun oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Kabupaten Tabanan.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD. Berdasarkan Permendagri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, proses penyusunan Renja OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan

penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja OPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta menyiapkan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Awal OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

Renja Awal OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melaksanakan tugas pokok yakni melaksanakan urusan Pemerintah dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Dalam Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melaksanakan program kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

1.2 Landasan Hukum

Dasar penyusunan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b. Peraturan Bupati Tabanan Nomor : 49 Tahun 2012 Sistem dan Prosedur Pengelolaan keuangan Daerah.
- c. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 41 tahun 2014 tentang Uraian jabatan Struktural Perangkat Daerah.
- d. Dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
- f. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja ini adalah untuk memberikan pedoman/gambaran tentang perencanaan kegiatan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2025 dan sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan Bupati, guna pencapaian target urusan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Tujuannya adalah Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Alami dan Terwujudnya Keluarga Berkualitas

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Berdasarkan evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mengajukan usulan program sebanyak 6 dan kegiatan sebanyak 14.

Program dan kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025 sesuai dengan Kebijakan Umum APBD adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Kegiatan Administrasi Keuangan

Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat

Daerah dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
- b. Penyediaan peralatan rumah tangga
- c. Penyediaan bahan logistik Kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan/material
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Surat – Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2. Program Pengendalian Penduduk

- Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penyusunan dan Pemerintahaan Grand Design Pembangunan Kependudukan GDPK Tingkat Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan :

- a. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga.
- b. Pengolahan data Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB.

3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

- Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- Dengan Sub Kegiatan:
 - a. Pengendalian Program KKBPK
 - b. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana
 - c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - d. Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui media Massa cetak dan elektronik serta media luar ruang.
 - e. Komunikasi Informasi dan edukasi KIE Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 - f. Advokasi Program Bangsa kencana oleh Pokja advokasi kepada stakholder dan mitra kerja.
- Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinas Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok).

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pergerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
- Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan ObatKontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat da Obat Kontasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan jejaringnya.
- b. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi jangka Panjang MKJP.

- c. Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan Kesehatan reproduksi di Fasilitas kesehatan termasuk Jarigan dan Jejaringnya.
- Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Integrasi Pembangunan Lintas sektor di Kampung KB
- b. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

- Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dengan Sub Kegiatan:

- a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA.
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)
- c. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB, BKL, PPKS, PIK R, dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor UPPKA.
- Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - a. Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK.R dan pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS

- b. Pemantauan Data dan Informasi Berisiko Stunting termasuk remaja calon Pengantin/ calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin,/ Kelahiran Batuta/Balita).
- c. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin,/ Kelahiran Batuta/Balita).

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN TABANAN

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2						Pemkab Tabanan									
2	08					Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kab. Tabanan									
2	08	1	1	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi OPD	80 %	70,05 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%
2	08	1	1	1	1	Kegiatan Penunjang Administrasi Perkantoran	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	80 %	70,05 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%
2	08	1	1	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran	82 %	80 %	80%	80%	100%	80%	82%	100%

							tugas fungsi OPD										
2	08	1	1	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan KB (DAK)	Jumlah jenis sapras yang diadakan	4 jenis	80 %	80%	80%	100%	80%	80%	100%		
2	08	1	1	2	3	Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis sarana dan prasarana kantor yang diadakan	2 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	2	4	Pembangunan Gedung Kantor (Garase)	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	1 jenis	0	0	0	0	0	0	0		
2	08	1	1	3		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase serapan anggaran sesuai target	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	08	1	1	3	1	Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	Jumlah dokumen saking tersedia	3 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	3	2	Kegiatan Pendataan aset	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	2 jenis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	15		Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif	73 %	70,05%	72,30%	72,30%	100%	73,00%	73%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	1	Kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Pasangan Usia subur miskin yang terlayani KB	175 akseptor	100%	175 Akseptor	100%	100%	100%	100%	75 akseptor	100%	
2	08	1	1	15	2	Kegiatan Bimtek Keluarga Berencana	Penurunan jumlah unmened 5%	133 desa	100%	133 desa	100%	100%	100%	100%	133 desa	100%	
2	08	1	1	15		Kegiatan pembangunan Balai Penyuluhan KB (DAK KELUARGA BERENCANA)	Tersedianya 1 Paket Balai Penyuluhan KB Kec. Kerambitan	1 unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
2	08	1	1	15	3	Kegiatan Bantuan Operasional KB (DAK)	Meningkatnya jumlah sasaran penggerakan pelayanan KB	10 Kec.	0	100%	100%	69,54%	100%	99,62%	100%		

2	08	1	1	15	4	Kegiatan Pelatihan Pelaporan Data Keluarga Berencana dan Keluarga	Jumlah dokumen laporan data	110 orang.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	5	Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera	Jumlah Kelompok Bina Keluarga yang mendapat Bintek / Pendampingan	5 klp	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	15	9	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Alokasi	Jumlah faskes KB yang mendapatkan alokasi	40 faskes	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Prosentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	74,50%	74,50%	75,00%	75,00%	100%	75,00%	75,00%	100%
2	08	1	1	16	1	Kegiatan Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya pengetahuan sikap perilaku remaja tentang KRR	120 or	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	08	1	1	16	2	Kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan	Meningkatnya Pengetahuan Pendewasaan Usia Perkawinan								
2	08	1	1	17		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)	87,10%	87,10%	88,75%	88,75%	100%	88,90%	88,90%	100%
2	08	1	1	17	1	Kegiatan Bimtek Kader Bina Keluarga Balita (BKB)	Meningkatkan pengetahuan kader dan kelompok BKB di Kab. Tabanan	10 klp	100%	100%	100%	100%	100%	10 klp	100%
2	08	1	1	17	2	Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB	Meningkatkan pergerakan aparat desa dan PLKB di bidang program KKBPK di Kampung KB	100 orang	100%	100%	100%	100%	100%	100 orang	100%
2	08	1	1	17	3	Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan bagi Kader	133 kader	100%	100%	100%	100%	100%	133 kader	100%

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Kinerja pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dimaksudkan adalah kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berkaitan dengan urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Adapun sub urusan dari urusan wajib yang menjadi kewenangan bersama antara kewenangan pusat, provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pengendalian Penduduk
2. Keluarga Berencana (KB)
3. Keluarga Sejahtera
4. Pengelolaan Penyuluh KB/PLKB, Standarisasi Pelayanan KB dan Sertifikasi Penyuluh KB (PKB/PLKB)

Sedangkan lingkup pelayanan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan terdiri atas :

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan yang mencakup Seksi Advokasi dan Pergerakan, Seksi Penyuluhan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB dan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
2. Bidang Keluarga Berencana yang mencakup Seksi Pengendalian Distribusi Alokasi, Seksi Jaminan Pelayanan KB dan Seksi Pembinaan Kesertaan KB
3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera, Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita dan Lansia serta Seksi Bina Ketahanan Remaja

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian		Proyeksi				Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12			
1	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	90%	90%	100%	100%	100%	100%	
2	Presentase Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta Kb Aktif			79%	79%	80%	81%	85%	80%	85%	90%	90%	90%	90%	
3	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap Desa			77%	77%	79%	81%	83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Presentase Keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga			76%	76%	77%	78%	80%	85%	90%	95%	95%	95%	95%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang pembentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan adalah melakukan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan azas Otonomi, Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dalam Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengendalian di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- b. Perumusan kebijakan teknis pengendalian di bidang kependudukan dan keluarga berencana
- c. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan, pengendalian penduduk penyuluhan dan pergerakan, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- d. Pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kearsipan
- e. Pembinaan PKB/PLKB
- f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan

Hasil analisa kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025 ada beberapa indikator kinerja yang belum terpenuhi, sehingga diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut permasalahan yang dihadapi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025 :

1. Capaian kinerja untuk indikator persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmeet need*) yang ditargetkan 5% realisasi 4%

2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Arah kebijakan pembangunan tahun 2025 sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan yang difokuskan pada **Pemerataan Pembangunan Berbasis Potensi Wilayah di Kabupaten Tabanan.**

Dari lima misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan fokus pada misi pertama yaitu Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya dan berkeadilan sosial. Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan pengetahuan dan teknologi.

Adapun Indikator Capaian Kinerja Tahun 2025 yang diinginkan pada aspek layanan umum:

- a. Terkendalinya Angka Kelahiran Penduduk adalah 78%
- b. Meningkatnya Cakupan Pelayanan Dalam Mewujudkan 8 Fungsi Keluarga adalah 8,56%

Atas isus-isu strategis, permasalahan dan prioritas pembangunan serta sasaran yang ingin dicapai maka dibuat perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, satuan dan pagu indikatif, serta lokasi oleh setiap OPD penanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025 sebanyak 4 Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Pengendalian Penduduk
3. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Untuk tabel review terhadap Renja Akhir RKPD tahun 2024 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan seperti berikut:

Tabel 2.3

Review terhadap Renja Akhir RKPD tahun 2024 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	4.883.445.400	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Tabanan	Prosentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	1 tahun	4.883.445.400	
2.	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%	337.600.000	Program Pengendalian Penduduk Kegiatan: 1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Tabanan	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	-	337.600.000	

3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. 2. Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tabanan	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	77%	2.230.444.000	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Kegiatan : 1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal 2. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 3. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Kab. Tabanan	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	77 %	2.230.444.000	
----	---	--------------	---	-----	---------------	---	--------------	---	------	---------------	--

4	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tabanan	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	78%	2.675.800.000	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Kegiatan: 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Tabanan	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	78%	2.675.800.000	
---	--	-----------------	--	-----	---------------	--	-----------------	--	-----	---------------	--

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang direncanakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025 dengan memperhatikan dan melakukan penelahaan berbagai kebutuhan dari berbagai usulan masyarakat, kegiatan-kegiatan yang dapat diakomodir dalam renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- 1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
Sub kegiatan Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB dan Advokasi PPKBD dan Institusi Masyarakat Pedesaan di Tingkat Kecamatan
- 2. Bidang Keluarga Berencana
Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi Bagi Keluarga Miskin dan Pengendalian dan Pendistribusian Alokon
- 3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Sub kegiatan Bintek dan Fasilitasi Kader Bina Keluarga Balita (BKB) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Untuk tabel usulan program dan kegiatan dari masyarakat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2025 Kabupaten Tabanan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Program/ Kegiatan	Loka si	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Cata tan
1	2	3	4	5	6
1	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: 1. Penyuluhan dan Pergerakan Aparat Desa dan PLKB di Kampung KB	Kab. Taba nan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)		

	2. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga				
2	Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kegiatan: 1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontasepsi Bagi Keluarga Miskin 2 Pengendalia n dan Pendistribusi an Alokon.	Kab. Taba nan	Prosentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif		
3	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Kegiatan: 1. Bintek dan Fasilitasi Kader Bina	Kab. Taba nan	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ber-KB (%)		



	Keluarga Balita (BKB)				
4	Program Kesehatan Reproduksi Remaja Kegiatan: 1. Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Kab. Tabanan	Prosentase Pasangan Usia Subur menikah di atas 21 tahun		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019 dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan "Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong" dengan misi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Visi dan Misi Pembangunan tersebut kemudian didukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), dimana BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia".

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No. 5 (di dalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menjadi "**Lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas**", dimana pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya *Total Fertility Rate* (TFR) menjadi 2,1 dan *Net Reproductive Rate* (NRR)= 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan

sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di bidang KKB;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang KKB;
- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;
- f. Penyusunan desain Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional;
- i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
- j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR)
- k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- m. Standarisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- n. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- o. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi di bidang KB;
- p. Penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang KKB;
- q. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum dilingkungan BKKBN;

- r. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
- s. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;
- t. Penyampaian laporan, saran dan pertimbangan di bidang KKB.

Dalam upaya untuk mendukung arah kebijakan Nasional, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan melakukan Program Keluarga Berencana dengan Kegiatan Pelayanan KIE, Pembinaan Keluarga Berencana, Penyediaan Dukungan Operasional Program Keluarga Berencana Nasional dan Peningkatan Kerjasama Mitra Kerja Program KB Nasional dalam rangka Kemandirian serta kegiatan Pengendalian Kependudukan yang hasil akhirnya dapat menurunkan angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*).

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan

Adapun Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan adalah:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Indikatornya adalah Nilai SAKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas,
Indikatornya adalah Persentase keluarga yang telah melaksanakan 8 fungsi keluarga.

Sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati terpilih Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berada pada tujuan 1 (satu) yaitu **Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)** pada sasaran 5 (lima) yaitu Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan menetapkan sasaran serta indikator yang menjadi tolak ukurannya sebagai berikut :

1. Sasaran :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dispenduk KB
2. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk Alami
3. Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga

2. Indikator Sasaran :

1. Nilai LKjIP.
2. Persentase PUS yang menikah diatas 21 tahun.
3. Persentase penurunan keluarga yang tergolong pra KS dan KS1

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan yang tertuang dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2021-2026 maka penetapan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus mendukung Tujuan Sasaran RPJMD

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KAB. TABANAN
TAHUN 2025**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE ADMINISTRASI PERKANTORAN YANG MENDUKUNG KELANCARAN TUGAS DAN FUNGSI PD	-			100 persen	4.462.767.200,00						-	5.145.395.800,00	
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LKJIP silahkan ubah	-			75 persen 1 Laporan	5.000.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		3.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	-			75 persen	3.556.267.800,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	4.005.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	3.551.267.800,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		4.000.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai LKJIP	-			75 persen	102.500.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	190.912.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	2.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				1 Paket	15.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		55.912.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai LKJIP	-			75 persen	20.000.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PERIODE RENSTRA OPD	CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Nilai LKJIP</i>	-			75 persen	571.579.400,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	675.183.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		3.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	41.495.600,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	526.583.800,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		626.683.800,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Nilai LKJIP</i>	-			75 persen	207.420.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB	-	239.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				4 Unit	187.420.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		196.300.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				5 Unit	20.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	OPD DPPKB		43.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif</i>	-			82 %	337.600.000,00						-	270.000.000,00	
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	-			1 Dokumen	78.200.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan	-	0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	498.694.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				2718 Orang	411.394.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan		500.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				1 Laporan	35.100.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	Masyarakat Kabupaten Tabanan		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di Kampung KB	-			83 %	130.750.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	-	-	135.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				1 Dokumen	3.750.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				12 Kampung	127.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	-		130.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	PERSENTASE KEUARGA YANG MEMILIKI PEMAHAMAN DAN KESADARAN TENTANG FUNGSI KELUARGA	-			85 persen	2.658.634.200,00						-	2.830.000.000,00	

				OPD		2024	2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKA)	-			1 laporan	360.000.000,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA	-	480.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				30 Unit	300.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		400.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.01.0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														
			Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	-			1 Laporan	2.298.634.200,00			-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif	-	2.350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				1 Organisasi	73.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SA SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				1 laporan	1.068.000.000,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif		1.070.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				1 laporan	1.157.634.200,00	Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	2. Kesehatan dan Pendidikan	PUS peserta KB aktif		1.200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	J U M L A H							10.135.939.400,00							10.546.895.800,00	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja akhir pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan pada tahun 2025 disusun sebagai bahan acuan dalam pelaksana program /kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan.

Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan untuk tahun 2025 bersumber dari dana APBD dan DAK. Besarnya alokasi anggaran per program dan kegiatan untuk belanja langsung dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6 Alokasi anggaran per program dan kegiatan untuk belanja langsung tahun 2025:

Nama Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja						Anggaran tahun 2022
		Capaian		Keluaran Sub		Hasil Kegiatan		
		Program	Kegiatan	Kegiatan		Hasil Kegiatan		
		Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							8.724
Program	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%			Nilai LKJIP	90 (A)	4.462.767.200
Kegiatan	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					0
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran	100%	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	3.000.000

		tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Jumlah dokumen Sakip tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	2.000.000
Kegiatan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					3.556267.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Jumlah layanan gaji dan tunjangan ASN setahun	12 bulan	Nilai LKJIP	90 (A)	3.551.267.800,.
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Jumlah dokumen aset tersedia	2 Dokumen	Nilai LKJIP	90 (A)	5.000.000,.

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 persen					102.500.000,.
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	2.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	12.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase administrasi perkantoran yang	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	3.000.000

		mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	10.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	15.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	50.000.000
	Penatausahaan Arsip Dinamis	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 A	10.000.000
Kegiatan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100%					121.300

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	20.000.000
Kegiatan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					571.579.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	3.500.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	41.495.600

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	526.583.800
Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%					207.420.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	187.420.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	20.000.000

		kelancaran tugas dan fungsi PD						
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100 %	Terlaksananya penunjang kegiatan kantor	1 Tahun	Nilai LKJIP	90 (A)	0
Program	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%					0
Kegiatan	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun				0
	Sub Penyusunan dan pemanfaatan Grand Disign Pembangunan kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen penyusunan dan Pemanfaatan Grand Dising Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Meningkatnya Keterampilan/Pengetahuan Siswa tentang Kependudukan	10 Kecamatan	78.200.000

Kegiatan	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB Aktif	78%					0
	Sub Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat yang mendapatkan Pengetahuan terbaru	10 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan data	10 Kecamatan	149.400.000
	Sub Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Jumlah DokumenPengo lahan dan Pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	78%	PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat yang mendapatkan Pengetahuan terbaru	10 Kecamatan	Meningkatnya Pengetahuan PLKB/PKB, Bidan dan Institusi Masyarakat dalam pencatatan dan pelaporan data	10 Kecamatan	110.000.000
Program	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%					2.676.938.000
Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%					1.602.538.000
	Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	PPKBD dan Institusi Masyarakat yang mendapat advokasi Program KKBPK	10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penganan kependudukan	10 Kecamatan	80.000.000

	Sub Kegiatan Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes) dan Mini Lokakarya(Minilok)	Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi,dan edukasi KIE	77 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan mekanisme operasional program bangga Kencana melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (rakordes) dan Mini Lokakarya(Minilok)	10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penaganan kependudukan	10 Kecamatan	150.000.000
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga kencana melalui Media masa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi,dan edukasi KIE	77 %	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bnagga kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan KB) melalui media masa cetak dan elektronik dan media luar ruang	10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penaganan kependudukan		183.000.000
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga kencana sesuai kearifan Budaya lokal	Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi,dan edukasi KIE	77 %	Jumlah Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) Program Bangga kencana sesuai kearifan Budaya lokal	10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penaganan kependudukan		60.000.000
	Sub Kegitan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advikasi kepada stake holder dan mitra kerja	Persentase Kader KB yang diberikan Advokasi Komunikasi, Informasi,dan edukasi KIE	77 %	Sub Kegitan Advokasi Program Bangga Kencana oleh Pokja Advikasi kepada stake holder dan	10 Kecamatan	Meningkatnya kualitas penaganan kependudukan		233.000.000

				mitra kerja				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78 %	Jumlah jenis sarpras yang diadakan	10 Paket	Meningkatnya kualitas penganan kependudukan	10 Kecamatan	496.000.000
Kegiatan	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78 %					638.400.000
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	78 %	Jumlah Kader Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10 Paket	Meningkatnya kualitas penganan kependudukan	10 Kecamatan	399.000.000
Kegiatan	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78 %					945.188.000

	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Jumlah faskes termasuk jaringan dan jejaringnya	40 Faskes	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	498.694.000
	Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kabupaten	78%	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				411.394.000
	Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Prosentase kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten	78%	Jumlah Laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	5%		1,10%	35.100.000
Kegiatan	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%					130.750.000
	Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif	78%	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa	89%	Angka Kelahiran Penduduk	1,10%	3.750.000

				dan PLKB di Kampung KB				
	Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan program bangga kencana di kampung keluarga berkualitas	Persentase meningkatnya pergerakan aparat desa dan PLKB di kampung KB		Jumlah Keluarga yang berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembanuna n kelluarga, kependuduk an dan KB				127.000.000
Program	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%					2.658.634.200
Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%					360.000.000
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75,00%	30.000.000
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75%	Cakupan Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	75,00%	30.000.000

	Sub Kegiatan Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejaterann keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS, PIK-R dan usaha peningkatan pendapatan keluarga Akseptor (UPPKA)	Persentase meningkatnya Pengetahuan remaja yang mendapat bimtek peningkatan Pembinaan Ketahanan dan kesejateraan keluarga	78%	JUmlah sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejaterann keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS , Pik-R dan usaha peningkata n pendapata n keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	78%	Persentase keluarga yang memahami dan kesadaran tentang fungsi keluarga	78%	300.000.000
Kegiatan	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%					2.298.634.200

	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga							
	Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Jumlah Kader BKB yang mendapat Bintek	10 Kelompok	Cakupan peserta KB Aktif	67%	73.000.000
	Sub Kegiatan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Cakupan pemantauan data dan informasi keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita	10 Kelompok	Cakupan peserta KB Aktif	67%	1.068.000.000
	Sub kegiatan Pendampingan Keluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita	Persentase Pasangan Usia Subur menikah diatas 21 tahun	78%	Jumlah nKeluarga berisiko stunting (termasuk remaja calon pengantin/cal on PUS, ibu hamil pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita	10 Kelompok	Cakupan peserta KB Aktif	67 %	1.157.634.200

				yang mendapat pendampingan				

BAB 5

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ditetapkan oleh Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan berkedudukan sebagai unsur pendukung otonomi daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja Awal (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan tahun 2022 adalah dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai acuan penyusunannya. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan 2016-2021 yang berisi pedoman yang memuat visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabanan, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan, yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Demikian Rencana Kerja Awal (RENJA) Tahun 2025 kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksana program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2025.

Oleh karena itu masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan dalam pelaksanaan tugas.

Tabanan,
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Tabanan,



Dra. Ni Wayan Mariati, MM
NIP. 19680926 199403 2 008
Pembina Tk. I (IV/b)